

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOGOR

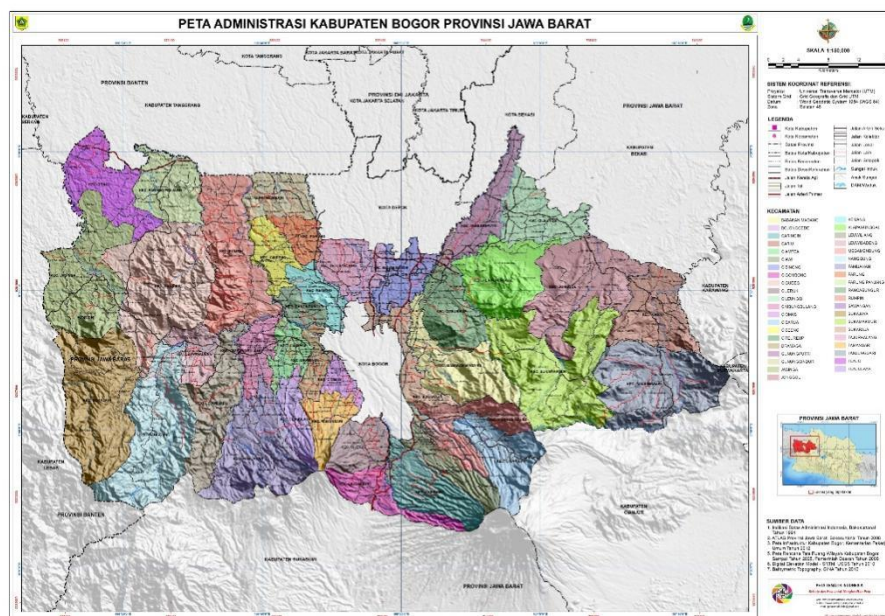
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Bogor

Regentschap Buitenzorg (Kabupaten Bogor) adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Cibinong merupakan ibukota dari Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang (Banten), Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara, Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi di selatan, serta Kabupaten Lebak (Banten) di barat. Kabupaten Bogor terdiri 40 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah kelurahan dan desa. 3 Juni adalah tanggal yang telah ditetapkan sebagai sejarah awal berdiri Kabupaten Bogor. Penetapan tanggal 3 Juni ini berdasarkan petunjuk tanggal pelantikan Raja Pajajaran yang terkenal yaitu Sri Baduga Maharaja yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1482 selama sembilan hari yang disebut dengan upacara “Kedabhakti.”

2.1.1 Kondisi geografis

Kabupaten Bogor yang dekat dengan ibu kota negara dan berfungsi sebagai pusat perdagangan, pemerintahan, dan jasa lainnya, terletak antara 6,190 LU – 6,470 LS dan 1060 1’-1070103’ Bujur Timur, dengan tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang cenderung rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, dataran rendah sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl), merupakan kategori ekologi hilir. Dataran bergelombang sekitar 43,62%

berada pada ketinggian 100 – 500 meter dpl, merupakan kategori ekologi tengah. Sekitar 19,53% daerah pegunungan berada pada ketinggian 500 - 1.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu. Daerah pengunungan tinggi sekitar 8,43% berada pada ketinggian 1.000 – 2.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000 – 2.500 meter dpl, merupakan kategori hulu.



Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Bogor

Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com/2013/12/10/administrasi-kabupaten-bogor/>

Kabupaten Bogor dibagi menjadi empat pembagian wilayah, yaitu wilayah timur, wilayah barat, wilayah selatan, dan wilayah tengah. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2015 berdasarkan hasil estimasi mencapai 5.331.149 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Gunung Putri (388.766 jiwa) dan jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Cariu (46.474 jiwa). Kepadatan penduduk tertinggi adalah di Kecamatan

Ciomas dengan kepadatan mencapai 100 jiwa/Ha, sedangkan kepadatan terendah ada pada Kecamatan Tanjungsari yang mencapai 4 jiwa/Ha.

2.1.2 Keadaan Perekonomian

Keterlibatan masyarakat khususnya dunia telah mampu mendukung pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bogor. Keberhasilan pembangunan ekonomi sangat membantu dan mendorong pembangunan di sejumlah bidang lainnya. Selain itu, hal ini merupakan peluang untuk meningkatkan prospek lapangan kerja, yang akan membantu mempercepat pertumbuhan regional dan kemajuan ekonomi. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan pendapatan per kapita setiap tahunnya.

Seluruh industri di dunia terdampak oleh pandemi COVID-19, termasuk Kabupaten Bogor. Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor yang tumbuh subur meningkat signifikan pasca pandemi COVID-19 melanda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor dan indikator makro perkembangan Kabupaten Bogor sejak pandemi COVID-19, mulai tahun 2021, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor cukup mencengangkan, yakni mulai minus 1,77 persen, melonjak hingga 3,55 persen, bahkan meningkat pesat pada tahun 2022 menjadi 5,20 persen.

Indikator lainnya, termasuk tingkat pengangguran, juga turun tajam; pada tahun 2020 sebesar 14,29 persen; pada tahun 2021 sebesar 12,22 persen; dan pada tahun 2022 kembali anjlok menjadi 10,64 persen. Daya

beli masyarakat Kabupaten Bogor meningkat sejak tahun 2020 yang hanya Rp. 10.317.000 per orang per tahun. Angka tersebut akan meningkat menjadi Rp10.410.000 per orang per tahun pada tahun 2021 dan Rp10.860.000 per orang per tahun pada tahun 2022. Angka kemiskinan juga menurun drastis di Kabupaten Bogor berkat semakin baiknya indikator makro; pada tahun 2020 sebesar 7,69 persen, meningkat akibat pandemi COVID-19.

Tabel 2 Angka Kemiskinan Kabupaten Bogor dan Jawa Barat

Angka Kemiskinan		
Wilayah	Tahun	
	2021	2022
Kabupaten Bogor	8,13%	7,73%
Jawa Barat	8,40%	8,06%

Angka kemiskinan di Kabupaten Bogor mengalami penurunan sejak tahun 2021, yaitu sebesar 8,13 persen pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 lebih rendah 7,73 persen dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bogor masih menduduki peringkat 11 dari 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat pada tahun 2022. Sedangkan angka kemiskinan Jawa Barat sebesar 8,06 persen dan Kabupaten Bogor sebesar 7,73 persen pada tahun 2022 (jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor turun hingga 16.500 jiwa) ,angka kemiskinan provinsi sebesar 8,40 persen pada tahun 2021 dan di Kabupaten Bogor sebesar 8,13 persen.

2.1.3 Keadaan Sosial, Pemerintah, dan Kelembagaan

Dari segi sosiokultural, warga Kabupaten Bogor merupakan tipikal masyarakat Jawa Barat yang tulus menjunjung tinggi kerukunan dan

menjunjung tinggi tradisi yang diwariskan secara turun temurun dengan baik. Slogan Kabupaten Bogor “Prayoga Tohaga Sayaga” yang bermakna masyarakat Kabupaten Bogor menjunjung tinggi persatuan, ketabahan, dan kekuatan mental serta perjuangan untuk senantiasa siap menghadapi berbagai permasalahan dalam mencapai tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Karena pengaruh daerah, kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Bogor berubah seiring dengan perjalanan mereka.

Masyarakat Kabupaten Bogor di wilayah utara yang berbatasan dengan DKI Jakarta sedang mengalami perubahan sosial yang menjadikan mereka lebih mirip masyarakat perkotaan dan terbuka terhadap proyek-proyek baru. Kabupaten Bogor berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi berbatasan dengan wilayah selatan, Kab Cianjur berbatasan dengan wilayah timur, dan Provinsi Banten berbatasan dengan wilayah barat. Masyarakat yang berada di wilayah tersebut cenderung lebih mudah beradaptasi dan khas masyarakat pedesaan. Kerajaan Tarumanegara didirikan di Kabupaten Bogor pada akhir abad ke-5 Masehi, menurut catatan sejarah dan budaya. Banyak sekali lokasi yang bisa menemukan artefak sejarah berupa prasasti, seperti Prasasti Ciaruteun di Kec. Ciampea, Prasasti Perkebunan Kopi di Kec. Cibungbulang, dan Prasasti Jambu di Kec. Leuwiliang.

Perkembangan lahan terbangun berkorelasi langsung dengan kepadatan dan jumlah penduduk. Setiap penghuninya memerlukan ruang untuk tinggal dan beraktivitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan

bertambahnya jumlah dan laju populasi, maka akan terjadi peningkatan permintaan terhadap lahan, yang akan menyebabkan terjadinya konversi lahan untuk keperluan pemukiman, komersial, atau pertanian. Lebih dari 6 juta orang menyebut Kabupaten Bogor sebagai rumahnya, dan 1 juta di antaranya berdomisili di Kecamatan Gunung Putri dan Cibinong, menurut data BPS Kabupaten Bogor. Dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk di kabupaten ini sebesar 4,19%, kedua kecamatan ini mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang signifikan: masing-masing sebesar 9,81% dan 7,03%. Berdasarkan faktor kepadatan penduduk, kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Cibinong, Bojong Gede, dan Ciomas dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000 jiwa/km². Bojong Gede merupakan lokasi stasiun komuter Bojong Gede dan dilayani oleh kereta komuter, sedangkan Ciomas dekat Kota Bogor dan stasiun komuter Bogor. Selain itu, terdapat korelasi antara kepadatan penduduk secara umum dan jaringan jalan utama, dimana wilayah yang melintasi jalan provinsi, nasional, dan tol biasanya memiliki tingkat kemacetan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain yang tidak melintasinya.

Wilayah Kabupaten Bogor menjadi saksi kebangkitan kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Sunda, Pajajaran Galuh, dan Kawali pada abad-abad berikutnya. Pada tanggal 3 Juni 1482, Kabupaten Bogor merayakan hari ulang tahunnya yang pertama. Tanggal ini juga menandai ritual Kadabhakti yang melantik Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja.

Berdasarkan perhitungan saat itu, Kabupaten Bogor berusia 525 tahun pada tahun 2007.

Pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, telah dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Maka dari itu pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Bogor menempati Kantor Pemerintahan di Cibinong sejak tahun 1990. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kabupaten Bogor merupakan salah satu dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang wajib membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) setelah tahun 2005- RPJPN 2025 mulai berlaku. Menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah serta mengacu pada RPJP Nasional, maka seluruh daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan otonomi daerah. menyiapkan dokumen RPJPD.

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati yang membawahi Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah, membawahi Satpol Pamong Praja, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, serta Kecamatan dan Desa. Dalam struktur ini Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagaimana umumnya pemerintah daerah kabupaten lainnya, juga didukung oleh 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun visi dan misi Kabupaten Bogor, yaitu:

Visi:

“Mewujudkan Kabupaten Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban”

Misi:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kesalehan sosial.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2 Gambaran Pendidikan di Kabupaten Bogor

Salah satu pintu masuk utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Peluang untuk pertumbuhan pribadi dan realisasi impian dimungkinkan melalui pendidikan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka ini, pendidikan merupakan sarana untuk belajar dan merupakan hak asasi setiap warga negara, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjunjung hak tersebut. Pendidikan dasar dan menengah merupakan salah satu program pendidikan dasar yang dilaksanakan. Fokus kebijakan di bidang pendidikan adalah pada peningkatan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah (Wajar Diknas), yaitu peningkatan mutu, pencegahan dan penanganan anak putus sekolah, perintisan dan pengembangan sekolah dasar dan menengah yang unggul, serta mengembangkan bahasa dan budaya daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada Indeks

Pembangunan Manusia di Kabupaten Bogor. Perluasan pendidikan dan pemerataan pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor. Dengan terus meningkatkan program pendidikan dan pelatihan guru, maka kualifikasi pendidikan dan kualitas guru dapat ditingkatkan.

Di Kabupaten Bogor, kemajuan sektor pendidikan menjadi fokus utama guna menginspirasi dan mendorong kemajuan di bidang dunia usaha. Hal ini merupakan salah satu komponen inisiatif peningkatan sumber daya manusia yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan dapat membantu menciptakan manusia layak yang antara lain diperlukan untuk menunjang kemajuan sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu pintu kunci untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah pendidikan. Pendidikan memberi orang dan masyarakat kesempatan untuk tumbuh sebagai manusia dan mencapai tujuan mereka. Dalam hal ini, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan dan merupakan hak dasar setiap warga negara, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjunjung hak tersebut. Pendidikan dasar dan menengah merupakan contoh layanan pendidikan dasar yang ditawarkan.

Indikator partisipasi pendidikan dapat digunakan untuk melacak keberhasilan inisiatif pendidikan yang didanai pemerintah dan menentukan apakah tujuan pembangunan pendidikan telah tercapai. Sejauh mana setiap orang, tanpa memandang gender, warna kulit, atau tempat tinggal—termasuk penyandang disabilitas—mencapai partisipasi sekolah merupakan ukuran hak atas pendidikan berkualitas tinggi.

Tabel 3 Angka Partisipasi Kasar Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan APK	Angka Partisipasi Kasar Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin					
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki dan Perempuan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
SD	101.80	-	107.17	-	104.44	104.64
SMP	89.67	-	86.55	-	88.11	92.02
SMA	62.87	-	60.98	-	61.95	64.13

Sumber: Susenas Maret 2020

Tabel 4 Angka Partisipasi Murni Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor

Tingkat Pendidikan APM	Angka Partisipasi Murni Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor					
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki dan Perempuan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
SD	99.18	-	99.03	-	99.11	99.15
SMP	86.71	-	81.88	-	84.29	85.26
SMA	53.99	-	52.36	-	53.20	54.66

Sumber: Susenas Maret 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa angka pendidikan di Kabupaten Bogor jika dilihat dari partisipasinya, siswa laki-laki lebih banyak daripada perempuan pada tahun 2020. Untuk jumlah keseluruhan, terjadi peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 pada setiap jenjangnya, baik angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni. Kemampuan suatu daerah untuk berhasil berkembang tergantung pada basis sumber daya manusianya. Salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan standar pendidikan di semua tingkatan. Hal ini mencakup perluasan jumlah dan mutu sarana dan prasarana pendidikan serta memberikan peluang pendidikan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat luas. Anda dapat melihat persentase penduduk menurut partisipasi

sekolah untuk melihat seberapa banyak penduduk yang menggunakan lembaga pendidikan. Biasanya terdapat beberapa indikator untuk menentukan tingkat partisipasi sekolah di suatu lokasi, seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK, yang dinyatakan dalam persentase, membandingkan siswa pada tingkat pendidikan tertentu dengan populasi umum usia sekolah. Semakin besar APK, berarti semakin banyak anak di luar usia sekolah atau semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang sekolah tertentu. NER, yang dilaporkan dalam persentase, membandingkan pencapaian pendidikan siswa pada usia sekolah tertentu dengan pencapaian pendidikan penduduk pada usia yang sama. Dengan nilai ideal 100%, semakin tinggi APM menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan usia resminya pada jenjang pendidikan tertentu.

Mengingat jumlah penduduk yang besar dan mayoritas penduduknya adalah generasi muda, Kabupaten Bogor mempunyai kewajiban yang besar untuk memastikan generasi mudanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selain persoalan pertumbuhan penduduk, penyebaran juga berdampak pada perkembangan pendidikan di Kabupaten Bogor. Terdapat variasi yang mencolok dalam aksesibilitas fasilitas pendidikan di seluruh Kabupaten Bogor. Secara umum, kota-kota mempunyai sekolah-sekolah unggulan yang dikelola secara terpisah. Kehadiran sekolah-sekolah unggulan di perkotaan menunjukkan bahwa pendidikan di lembaga-lembaga tersebut relatif mahal. Namun di daerah tertentu, proses penyelenggaraan pendidikan masih terkonsentrasi pada perluasan cakupan dan belum mencapai peningkatan mutu.

Kabupaten Bogor mempunyai kewajiban yang sangat besar untuk memberikan generasi muda akses terhadap pendidikan berkualitas karena besarnya wilayah dan demografi usia muda yang dominan. Selain permasalahan jumlah penduduk, persebaran juga turut berperan dalam mengembangkan pendidikan di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor, terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam penyediaan lembaga pendidikan. Secara umum, sekolah di perkotaan memiliki kualitas yang tinggi dan dijalankan secara mandiri. Kehadiran sekolah-sekolah berkualitas tinggi di wilayah metropolitan menunjukkan bahwa biaya pendidikan di lembaga-lembaga tersebut cukup tinggi. Di sisi lain, proses penyelenggaraan pendidikan di tempat tertentu masih berpusat pada perluasan cakupan atau belum mencapai peningkatan mutu.

Dalam rangka menggerakkan dan mendorong peningkatan sektor perekonomian, Kabupaten Bogor memprioritaskan pengembangan sektor pendidikan. Hal ini merupakan salah satu komponen inisiatif peningkatan sumber daya manusia yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan agar melalui pendidikan dapat tercipta manusia-manusia baik yang dapat membantu pertumbuhan berbagai sektor masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Terdapat 29.466 siswa SMA dan 29.466 siswa SMK di Kabupaten Bogor pada tahun 2016–2017, menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017). Menurut data tahun 2013–2014, Madrasah Aliyah menampung sekitar 15.000 siswa.

Tabel 5 Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di Kabupaten Bogor

Tahun	2021	2022
Angka Partisipasi Kasar	25.42%	25.96%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2021-2022, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di Kabupaten Bogor bisa dikatakan meningkat, yang awalnya pada tahun 2021 berjumlah 25.420 ribu, meningkat menjadi 25.960 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa minat para pemuda di Kabupaten Bogor untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi meningkat. Pendidikan tinggi sangatlah penting karena akan membentuk kita menjadi mahasiswa yang cerdas, beragama, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebersamaan. Selain itu juga akan melahirkan individu-individu dengan talenta terspesialisasi yang akan terus bersaing demi kemajuan bangsa, dan tidak hanya sekedar menonton dari pinggir lapangan. Demi meningkatkan angka pendidikan dalam jenjang perguruan tinggi, pemerintah kabupaten Bogor memberikan fasilitas berupa bantuan beasiswa bagi pemuda berprestasi Kabupaten Bogor yang memang membutuhkan bantuan biaya untuk kuliah, yaitu beasiswa Pancakarsa.

Dalam rangka melaksanakan salah satu tujuan utama Karsa Bogor Cerdas, yaitu membantu anak-anak berprestasi di daerah untuk mendapatkan beasiswa. Pemerintah Kabupaten Bogor harus membantu dan memberikan kesempatan kepada generasi muda tersebut untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya dengan memberikan beasiswa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya pemuda dan memberikan stimulan kepada generasi muda berprestasi dari keluarga kurang mampu dalam menempuh pendidikan tinggi. Dirasa penting untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pemberian Beasiswa agar pengelolaan program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Bogor lebih maksimal, lebih terarah, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor merupakan pencetus diadakannya program beasiswa Pancakarsa bagi para mahasiswa dengan domisili asli Kabupaten Bogor. Beasiswa Pancakarsa dimaksudkan untuk membantu generasi muda yang berhak dari keluarga berpenghasilan rendah untuk melanjutkan studinya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditentukan. Tujuan diberikannya Beasiswa Pancakarsa, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pemuda yang memiliki daya saing dan kompetitif.
- b. Memberikan penghargaan serta menumbuhkan harapan dan motivasi bagi pemuda berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
- c. Menghasilkan sumber daya insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten menawarkan program beasiswa yang disebut Beasiswa Panca Karsa. Untuk pemuda di Kabupaten Bogor berusia antara 16 dan 30 tahun, termasuk mereka yang baru memulai dan mereka yang sedang mengikuti program perguruan tinggi. Pada masing-masing universitas mitra, besaran beasiswa disesuaikan dengan UKT, maksimal Rp 10.000.000 per semester. Beasiswa diberikan maksimal delapan semester, atau sampai lulus.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terbatas kewenangannya yaitu hanya mengelola pendidikan tingkat dasar 9 tahun (SD dan SMP) sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga beasiswa pancakarsa bagi pemuda berprestasi dikelola oleh Dispora Kabupaten Bogor sesuai Peraturan

Daerah Kabupaten Bogor No,1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan pada pasal 54 yang berbunyi pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi dan organisasi kepemudaan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda. Pemerintah Kabupaten Bogor akan segera meluncurkan Beasiswa Pancakarsa bagi mahasiswa S1 asal Kabupaten Bogor yang berusia antara 16 hingga 30 tahun pada tahun 2022. Mahasiswa yang terdaftar di salah satu dari 67 universitas mitra—mulai dari IPB University hingga Universitas Pakuan—berhak untuk mendaftar program ini. Beasiswa Pancakarsa akan menerima 1,200 pelamar yang layak pada tahun 2021. Seleksi administrasi dan seleksi prestasi merupakan dua tahapan seleksi yang akan dibuka kembali pada tahun 2022.

Menurut Bappedalitbang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bogor, penerima beasiswa program Pancakarsa diharapkan menyelesaikan studinya pada tahun 2025–2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018. Pemberian Beasiswa Pancakarsa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

Seleksi Administrasi dan Seleksi Prestasi merupakan dua proses yang membentuk proses seleksi para pendaftar beasiswa pancakarsa. Kelengkapan berkas administrasi yang disediakan melalui internet menentukan langkah awal seleksi

administrasi. Evaluasi prestasi peserta dengan teknik kuantifikasi yang diputuskan panitia menjadi dasar seleksi tahap kedua. Skor seorang peserta bertambah seiring dengan banyaknya prestasi yang dimilikinya. Calon pelamar beasiswa diharuskan untuk menyatakan pada saat pendaftaran bahwa mereka tidak menerima beasiswa lain saat ini. Selain itu, Penerima Beasiswa Pancakarsa wajib mengembalikan dana sebanyak dua kali lipat dari jumlah yang telah diberikan melalui Program Beasiswa Pancakarsa kepada Kas Daerah jika ternyata mereka mendapat beasiswa dari organisasi lain.

Program Beasiswa Pancakarsa diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta sebagai mitra.